

Bupati Barru Hadiri Rakor Forkopimda Sulsel Bahas Akselerasi Pembangunan 2025

MUH. HASYIM HANIS, SE, S.Pd, C.L.E - BARRU.PUBLICRELATIONS.ID

Jan 10, 2025 - 17:05



Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel

MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati/Walikota se-Sulsel dan Kepala Instansi Vertikal, pada hari Jum'at, 10 Januari 2025.

Rakor tersebut digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam akselerasi pembangunan di

Sulsel pada tahun 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, ini mengusung tema "Sinergitas Akselerasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025".

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan fokus pada percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan.



Pj Gubernur juga menggarisbawahi beberapa poin penting yang menjadi fokus kebijakan Pemerintah Pusat, yakni memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga kestabilan politik dan keamanan, ketahanan pangan untuk mengatasi krisis pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Dalam laporan inflasi, Pj Gubernur mengungkapkan bahwa angka inflasi bulan Desember 2024 tercatat sebesar 0,38%, yang dipengaruhi oleh 10 komoditas utama.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Sulsel, serta mengajak semua instansi untuk mendukung program prioritas nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Sesi tanya jawab juga digelar pada rapat tersebut. Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh.,M.Si, dalam kesempatan ini, menyampaikan tanggapannya terkait Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur

pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

"ketentuan untuk menunda proses pelelangan dan penandatanganan kontrak hingga adanya kepastian mengenai dana cadangan dari pusat dapat berdampak pada stagnasi sejumlah program pembangunan daerah," ungkap Suardi.

Suardi Saleh berharap adanya kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait besaran dana cadangan, guna mempercepat akselerasi pembangunan di daerah.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk mendukung sinergitas dan program-program yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

Rapat ini diakhiri dengan foto bersama, dan diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang lebih cepat dan merata di Sulawesi Selatan.

(mhh/hpb)